

**Analisis Implementasi Kebijakan dan Strategi
Meningkatkan Kualitas Pendidikan Islam
di SDN 013 Palaran**

Muhammad Rezza Nur Rahman

SMK TI Pratama Samarinda

rezzanur339@gmail.com

Ahmad Ridani

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

ahmadridani2021@gmail.com

Ika Ayulanda

SDN 007 Samarinda

ikaayulanda@gmail.com

Abstract

The Islamic education policy implemented is certainly a complex thing, so that its implementation must continue to be monitored and evaluated so that it runs smoothly. The existence of communication factors, human resources, disposition, and structure in schools can cause the implementation of Islamic education policies obstructed, including in the SDN 013 Palaran environment. This study aims to analyze the implementation of Islamic education policies and strategies in improving the quality of Islamic education at SDN 013 Palaran. This study is field research with a qualitative descriptive approach generated from interview data, then analyzed with the stages of data condensation, data display, and conclusion drawing. The results of this study stated that the Islamic education policy at SDN 013 was implemented through PAI BP learning based on an independent curriculum or commonly called "Kurikulum Merdeka", which was supported by other programs outside of learning. The strategy to improve the quality of Islamic education at SDN 013 will involve the academic community and parents of students to maximize Islamic education policies in schools.

Keywords: *Implementation, Islamic Education, Policy, Strategy*

Abstrak

Kebijakan pendidikan Islam yang diimplementasikan tentu merupakan hal yang kompleks, sehingga pelaksanaannya harus terus dipantau dan dievaluasi agar berjalan lancar. Adanya faktor-faktor komunikasi, sumber daya manusia, disposisi, dan struktur di dalam sekolah dapat menyebabkan implementasi kebijakan pendidikan Islam tidak berjalan lancar, termasuk di lingkungan SDN 013 Palaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pendidikan Islam dan strategi dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam di SDN 013 Palaran. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang dihasilkan dari data wawancara, kemudian dianalisis dengan tahapan kondensasi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa kebijakan pendidikan Islam di SDN 013 diimplementasikan melalui pembelajaran PAI BP berdasarkan kurikulum merdeka, yang didukung dengan program-program lainnya di luar pembelajaran. Strategi dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam di SDN 013 akan melibatkan seluruh civitas academica beserta orang tua siswa untuk memaksimalkan kebijakan pendidikan Islam di sekolah.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pendidikan Islam, Strategi

A. Pendahuluan

Pendidikan Islam sejatinya bertujuan membentuk individu yang taat beribadah, bertakwa, beriman, berakhlak mulia, dan berkarakter insan kamil dalam sebagai fondasi untuk menjadi khalifah atau pemimpin di bumi.¹ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ
الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Terjemahan:

“(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”²

¹ Anang Fahrur Rozi dkk., “Urgensi Pendidikan Islam Non-Dikotomi di Era Society 5.0,” *Kuttab: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 6, no. 1 (2022): 94, <https://doi.org/10.30736/ktb.v6i1.782>.

² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Qur'an Kemenag*, Qur'an Kemenag in Microsoft Word (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2022), Q.S. Al-Baqarah/2:30, <https://quran.kemenag.go.id/>.

Kata “Khalifah” dalam ayat tersebut ditunjukkan dalam *Qur’an Kemenag* dimaknai sebagai “Pemimpin”. Tafsir ringkas Kementerian Agama juga menjelaskan bahwa ketika Allah berfirman ingin menjadikan khalifah di bumi, maksudnya adalah “Manusia yang akan menjadi pemimpin dan penguasa di bumi.” Kekhalifahan tersebut akan terus berganti setiap generasinya hingga hari kiamat.³ Untuk membentuk kepribadian Khalifah yang baik dan sesuai syariat Islam sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya, maka sangat diperlukan pendidikan Islam untuk membentuk karakter kepribadian muslim yang ingin dicapai.

Peran pendidikan Islam yang begitu penting tentunya perlu dilaksanakan sebaik-baiknya. Untuk itu, kebijakan yang mengatur pendidikan Islam sehingga memiliki standar dalam pelaksanaannya sangat dibutuhkan. Adanya kebijakan terkait pendidikan Islam juga disebutkan dalam penelitian oleh Amin Maghfuri membuat pendidikan Islam disetarakan kepentingannya dengan pendidikan lainnya yang menjadi program prioritas.⁴

Sebagai tindak lanjut penyetaraan pendidikan Islam dengan pendidikan lainnya, diberlakukan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 11 Ayat 2 dan Pasal 76,⁵ yang selanjutnya direvisi menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 13 dan Penjelasan Umum Nomor 3,⁶ yang membahas terkait penyelenggaraan pendidikan dasar yang merupakan urusan pemerintah daerah. Implikasi dari Undang-undang tersebut mengembangkan pendidikan Islam, termasuk Madrasah dan Pesantren.⁷ Kebijakan pendidikan Islam disebutkan dalam penelitian oleh Febri Giantara dan Reni Amiliya sebagai bidang dengan kontribusi terbaik terkait proses pengambilan kebijakan, sehingga diperlukan pengkajian terkait hal tersebut.⁸

Kebijakan pendidikan Islam yang diimplementasikan tentu merupakan hal yang kompleks. Pelaksanaannya harus terus dipantau dan dievaluasi, sehingga dapat berjalan lancar. Meskipun dilaksanakan

³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Tafsir Ringkas Kemenag Q.S. Al-Baqarah/2:30.

⁴ Amin Maghfuri, “Analisis Politik dan Kebijakan Pendidikan Islam pada Awal Orde Reformasi (1998-2004),” *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2020): 24, <https://doi.org/10.30603/tjmpi.v8i1.614>.

⁵ Presiden Republik Indonesia, “Pemerintahan Daerah,” Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 § (1999).

⁶ Presiden Republik Indonesia, “Pemerintahan Daerah,” Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 § (2004).

⁷ Moh. Rifa’i, “Kebijakan Pendidikan Islam dalam Era Otonomi Daerah,” *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 1 (26 Januari 2017): 101.

⁸ Febri Giantara dan Reni Amiliya, “Urgensi Kebijakan Pendidikan Islam sebagai Bagian dari Kebijakan Publik (Analisis Teoretis),” *Madania: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 11, no. 2 (2021): 94.

pemantauan dan evaluasi rutin, namun tentunya dalam realitas tidak semua sekolah bisa mengimplementasikan kebijakan pendidikan Islam. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor sebagaimana disebutkan dalam penelitian oleh Erisa Nada Dewanti et al. antara lain komunikasi, sumber daya manusia, disposisi, dan struktur di dalam sekolah.⁹

Berbagai faktor disebutkan tentunya menghambat implementasi kebijakan pendidikan Islam di sekolah. Faktor lainnya dalam penelitian oleh Ali Maulida, Muhamad Priyatna, dan Unang Wahidin bisa ditinjau dari kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Lebih spesifik, di lingkungan sekolah akan bergantung pada *civitas akademika* di lembaga sekolah.¹⁰ Mengatasi hal tersebut, diperlukan strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam di lingkungan sekolah.

Beberapa penelitian serupa juga telah dilakukan, seperti penelitian oleh Ria Putranti Arwitaningsih dkk. yang membahas terkait implementasi kurikulum merdeka untuk rumpun mata pelajaran pendidikan Islam.¹¹ Kemudian, penelitian oleh Nurhandayani Hasanah dkk. yang membahas terkait faktor penghambat dan upaya peningkatan mutu pendidikan Islam di Sekolah Dasar Negeri 2 Jerowaru.¹² Penelitian lain oleh Syafaruddin, Mesiono, dan Aziddin Harahap terkait implementasi kebijakan kepala dinas pendidikan untuk meningkatkan pemahaman al-Qur'an di Sekolah Dasar Negeri di Labuhanbatu.¹³ Kebaruan penelitian ini dibandingkan ketiga penelitian tersebut adalah kebaruan dari segi data dengan mengambil lokasi di salah satu sekolah dasar di Palaran, Samarinda. Kebaruan lainnya adalah fokus penelitian ini tidak hanya terkait implementasi kebijakan pendidikan Islam, namun juga strategi dari sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam yang dilakukan.

⁹ Erisa Nada Dewanti dkk., "Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia," *Anwarul: Jurnal Pendidikan dan Dakwah* 2, no. 4 (2022): 324, <https://doi.org/10.58578/anwarul.v2i4.494>.

¹⁰ Ali Maulida, Muhamad Priyatna, dan Unang Wahidin, "Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Perspektif Mastuhu: Studi Analisis Perspektif Pemikiran Tokoh Pendidikan Islam," *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 2 (2019): 454.

¹¹ Ria Putranti Arwitaningsih dkk., "Konsep dan Implementasi Kurikulum Merdeka pada Ranah Rumpun Mata Pelajaran Pendidikan Islam di Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Hadi Mojolaban Sukoharjo," *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI* 10, no. 2 (2023): 450–68.

¹² Nurhandayani Hasanah dkk., "Analisis Faktor Penghambat dan Upaya untuk Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri," *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 3 (2024): 3162–69, <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i3.3769>.

¹³ Syafaruddin, Mesiono, dan Aziddin Harahap, "Implementasi Kebijakan Kepala Dinas Pendidikan dalam Peningkatan Pemahaman Terhadap Kitab Suci Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri," *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 11, no. 1 (2022), <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ei/article/view/1440>.

B. Kajian Pustaka

1. Implementasi Kebijakan Pendidikan

Implementasi dalam kamus Merriam-Webster diartikan sebagai “pelaksanaan atau contoh penerapan dari suatu hal,” atau bisa juga sebagai “proses membuat sesuatu menjadi aktif atau efektif.”¹⁴ Ermanovida et al. mendefinisikan implementasi sebagai pelaksanaan rencana yang sebelumnya sudah matang dan rinci.¹⁵ Disintesis dari kedua pengertian tersebut bahwa implementasi merupakan pelaksanaan rencana dari suatu hal secara terinci sehingga menjadi efektif.

Kebijakan didefinisikan oleh Abd. Majid sebagai pedoman berperilaku dari suatu keputusan yang dirumuskan pemerintah yang berisi tujuan, rencana, dan program pelaksanaan. Abd. Majid juga memberikan definisi kebijakan oleh Charles O. Jones yang sebelumnya dikutip oleh Suharno, yaitu tingkah laku konsisten yang menjadi ketetapan, berlaku bagi pembuat dan orang-orang yang menaatinya.¹⁶ Secara tidak langsung, definisi dari Abd Majid menyatakan bahwa kebijakan berupa peraturan tertulis, sementara Charles O. Jones menyatakan bahwa kebijakan bisa berupa aturan tertulis maupun kebiasaan yang disepakati.

Implementasi kebijakan dalam penelitian oleh Dukha Yunitasari, Ida Bagus Putu Arnyana, dan Nyoman Dantes memiliki definisi secara konsep dan metodologi. Secara konsep, implementasi kebijakan berarti perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan evaluasi dari suatu kebijakan. Secara metodologi, implementasi kebijakan adalah produk berupa indikator strategi, metode, pola pelaksanaan, analisis efektivitas, dan dampak dari kebijakan yang dibuat.¹⁷ Umar Sidiq dan Wiwin Widyawati mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai cara melaksanakan kebijakan agar mencapai tujuannya,¹⁸ dengan faktor-faktor yang mendukungnya yaitu komunikasi,

¹⁴ “Implementation,” dalam *Merriam-Webster Dictionary* (Merriam-Webster.com, 2024), <https://www.merriam-webster.com/dictionary>.

¹⁵ Ermanovida dkk., *Strategi Implementasi Kebijakan Kuliah Daring Masa Pandemi Covid-19 dengan Menerapkan Teknologi Digital Dalam Proses Pembelajaran PKN di Universitas Sriwijaya*, ed. oleh Nur Imanti dkk. (Palembang: Bening Media Publishing, 2021), 45.

¹⁶ Abd. Madjid, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, ed. Alviana Cahyanti (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), 9. Abd Majid mendefinisikan kebijakan sebagai "Aturan Tertulis", sementara Charles O. Jones menyatakan bahwa kebijakan bisa berupa tertulis atau hanya sekadar ketetapan dan kesepakatan. Penulis cenderung mengarah kepada definisi yang diberikan oleh Charles O. Jones.

¹⁷ Dukha Yunitasari, Ida Bagus Putu Arnyana, dan Nyoman Dantes, “Implementasi Kebijakan Pendidikan Dasar (Definisi, Aktor Pelaksana, Arena/Konteks, Jenis, dan Langkah Kebijakan Pendidikan Dasar),” *JPPi: Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia* 9, no. 3 (2023): 1510.

¹⁸ Umar Sidiq dan Wiwin Widyawati, *Kebijakan Pemerintah terhadap Pendidikan Islam di Indonesia*, ed. oleh Ahmad Choirul Rofiq (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), 17.

sumber, disposisi, dan sikap atau struktur birokrasi.¹⁹ Penulis cenderung mengartikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang.

Implementasi kebijakan pendidikan didefinisikan dalam penelitian oleh Erisa Nada Dewanti dkk. sebagai proses terkait dengan perilaku suatu kelembagaan yang bersifat administrasi dalam pelaksanaan program, baik secara langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan politik, ekonomi, sosial dan hukum, serta terdiri atas beberapa tahap.²⁰ Implementasi kebijakan pendidikan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses pelaksanaan keputusan dari lembaga yang menyelenggarakan pendidikan terkait dengan proses pendidikan itu sendiri. Jika dikaitkan dengan pendidikan Islam, maka maksudnya adalah proses pelaksanaan keputusan lembaga yang menyelenggarakan pendidikan Islam seperti sekolah, Madrasah, dan pesantren.

2. Kebijakan Pendidikan Islam

Kebijakan pendidikan Islam di Indonesia tentunya secara garis besar mengacu kepada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 30, yang menyatakan bahwa pendidikan keagamaan diselenggarakan dan diatur oleh pemerintah berdasarkan peraturan pemerintah.²¹ Sebagai kelanjutan dari regulasi Pasal 30 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan pada Pasal 3 Ayat 2, yang menyatakan bahwa pendidikan agama dikelola oleh Menteri Agama.²² Di dalam regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 pada Pasal 4 Ayat 1 juga dijelaskan bahwa pendidikan agama di lembaga pendidikan sekurang-kurangnya diselenggarakan dalam bentuk mata pelajaran atau mata kuliah.²³

3. Strategi Peningkatan Kualitas Pendidikan Islam

Strategi didefinisikan dalam penelitian oleh Dwi Harmita, Fina Sofiana, dan Alfauzan Amin sebagai seni menggunakan rencana dalam

¹⁹ Umar Sidiq and Wiwin Widyawati, *Kebijakan Pemerintah ...*, 18. Lihat juga pada Erisa Nada Dewanti et al., "Implementasi Kebijakan ...," 324.

²⁰ Erisa Nada Dewanti et al., "Implementasi Kebijakan ...," 318.

²¹ Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional" (Jakarta, 2003), Pasal 30.

²² Presiden Republik Indonesia, "Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan," Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 § (2007), Pasal 3 Ayat 2.

²³ Presiden Republik Indonesia, Pasal 4 Ayat 1.

rangka mencapai tujuan.²⁴ Strategi dalam konteks lembaga pendidikan, khususnya sekolah, didefinisikan oleh Mia Noprika, Ngadi Yusro, dan Sadiman sebagai kebijakan penting dari sekolah dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kualitas atau mutu sekolah lain.²⁵ Penulis dalam hal ini mengartikan strategi sebagai rencana kegiatan atau program yang akan atau sedang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Kegiatan yang dimaksud bukan hanya sekadar rencana, tapi juga meliputi kegiatan yang sedang dilakukan saat ini.

Kualitas menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* memiliki empat makna, yaitu “tingkat baik buruknya sesuatu”, “kadar”, “derajat atau taraf”, dan “mutu.”²⁶ Kualitas atau mutu didefinisikan dalam penelitian oleh Ahmad Fauzi sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dari konsumen yang bersifat dinamis. Ahmad Fauzi juga mengutip tiga konsep mutu, yaitu perencanaan mutu, kendali mutu, dan perbaikan mutu.²⁷ Singgih Aji Purnomo dalam penelitiannya mengutip pendapat Edward Sallis yang membagi dua definisi dari mutu, yaitu definisi mutlak dan definisi relatif. Mutu ditinjau dari definisi mutlak yaitu nilai dari standar tinggi yang tidak bisa dilawan. Adapun definisi relatif dari mutu yaitu nilai yang bergantung dengan spesifikasi yang tersedia atau ditawarkan.²⁸ Mutu dalam konteks pendidikan disebutkan oleh Mia Noprika, Ngadi Yusro, dan Sagiman meliputi empat hal, yaitu *input*, *proses*, *output*, dan *outcome*.²⁹

Strategi peningkatan kualitas dapat diartikan sebagai rencana kegiatan yang akan atau sedang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas atau nilai suatu hal. Jika dikaitkan dengan konteks pendidikan Islam, maka strategi peningkatan kualitas pendidikan Islam merupakan rencana kegiatan atau program yang akan dan sedang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas subjek, proses, hasil, dan dampak pendidikan Islam. Kualitas subjek berarti kualitas peserta didik yang masuk dan guru yang direkrut. Kualitas

²⁴ Dwi Harmita, Fina Sofiana, dan Alfauzan Amin, “Inovasi Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam,” *JPKD: Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4, no. 5 (2022): 2197.

²⁵ Mia Noprika, Ngadri Yusro, dan Sagiman, “Strategi Kepala Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan,” *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam dan Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2020): 226, <https://doi.org/10.36671/andragogi.v2i2.99>.

²⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Kualitas,” dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2016), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kualitas>.

²⁷ Ahmad Fauzi, “Analisis Biaya Mutu dalam Meningkatkan Daya Saing Pendidikan,” *Jumpa: Jurnal Manajemen Pendidikan* 1, no. 1 (February 28, 2020): 53.

²⁸ Singgih Aji Purnomo, “Pengembangan Mutu Manajemen Lembaga Pendidikan dalam Penerapan ISO 9001:2008 pada SMK Swasta Ma’arif NU 1 Ajibarang Provinsi Jawa Tengah,” *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam dan Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2020): 130, <https://doi.org/10.36671/andragogi.v2i1.78>.

²⁹ Mia Noprika, Ngadri Yusro, and Sagiman, “Strategi Kepala ...,” 226.

proses berarti kualitas dari pembelajaran pendidikan Islam beserta kegiatan penunjang lainnya. Kualitas hasil berarti kualitas dari lulusan yang dihasilkan dari pembelajaran pendidikan Islam. Kualitas dampak berarti kualitas yang timbul setelah menghasilkan lulusan pembelajaran pendidikan Islam.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang memungkinkan data dihasilkan sesuai dengan kondisi lapangan.³⁰ Data dikumpulkan melalui teknik wawancara³¹ dengan narasumber merupakan guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SDN 013 Palaran. Analisis data menggunakan konsep Miles, Huberman, dan Saldaña dengan tahapan kondensasi data, display data, dan penarikan kesimpulan.³²

D. Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam di SDN 013 Palaran

SDN 013 Palaran dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan Islam terfokus pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti bagi para siswa. Pembelajaran tersebut mengacu pada kurikulum merdeka dan menyesuaikan standar capaian kompetensi yang dirumuskan oleh Kementerian Agama. Landasan dari pembelajaran tersebut umumnya berupa pembelajaran Al-Qur'an dan Hadis, Sejarah, Syariat Islam, dan Akhlak atau Budi Pekerti. Selain pelaksanaan pembelajaran, kegiatan lainnya yang mendukung kebijakan pendidikan Islam yang diterapkan di SDN 013 Palaran meliputi Shalat Duha, Hafalan Surah-surah Pendek dan Doa-doa Harian, Shalat Zuhur Berjamaah, serta Perayaan Hari Besar Islam.

Shalat Duha dilaksanakan oleh siswa-siswi SDN 013 Palaran setiap hari sebelum pembelajaran dimulai. Siswa-siswi yang beragama Islam diarahkan dan dibiasakan untuk melakukan Shalat Duha sebelum belajar, sehingga menumbuhkan karakter kedisiplinan, dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan sebagai bagian dari tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti.

³⁰ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, Second Edition (Thousand Oaks, California: Sage Publications, 1994).

³¹ Feny Rita Fiantika dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2022); John Ward Creswell dan J. David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Fifth Edition (Los Angeles, United States of America: Sage Publications, 2018).

³² Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, Third Edition (Arizona, United States of America: Sage Publications, 2013).

Siswa-siswi juga diberikan kegiatan tambahan yang diwajibkan, yaitu hafalan surah-surah pendek. Siswa-siswi ditargetkan untuk mempunyai hafalan ketika lulus minimal dari Surah An-Nas hingga Ad-Duha. Hafalan biasanya akan disetor setiap Hari Jumat kepada Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Selain surah-surah pendek, siswa-siswi juga diwajibkan untuk menyeter doa-doa harian untuk menambah kapasitas hafalan yang dimiliki.

Sebelum pulang sekolah, siswa-siswi SDN 013 Palaran juga diwajibkan untuk mengikuti Shalat Zuhur berjamaah. Hal ini dilakukan dalam rangka membiasakan siswa-siswi untuk melaksanakan Shalat wajib tepat pada waktunya, sekaligus melatih untuk bersikap tenang saat melakukan Shalat berjamaah. Karakter yang ditumbuhkan dalam kegiatan ini adalah karakter spiritual, disiplin, dan akhlak mulia.

Program lainnya yang dilakukan SDN 013 Palaran dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan pendidikan Islam di sekolah adalah Perayaan Hari Besar Islam atau PHBI. Di antara PHBI yang dilaksanakan dan dirayakan civitas akademika SDN 013 Palaran adalah Perayaan Tahun Baru Muharram dengan mengikuti Pawai Muharram, Perayaan Maulid Nabi Muhammad, Perayaan Isra Mi'raj, Pelaksanaan Pesantren Ramadhan, dan Perayaan Hari Raya Idul Adha. PHBI dilakukan dalam rangka meningkatkan karakter spiritual dengan meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia bagi siswa-siswi di SDN 013 Palaran.

2. Analisis Strategi Peningkatan Kualitas Pendidikan Islam di SDN 013 Palaran

Strategi peningkatan kualitas pendidikan Islam di SDN 013 Palaran melibatkan kepala sekolah, tata usaha, guru, siswa, dan orang tua siswa. Strategi utama yang dilakukan adalah memaksimalkan penerapan kebijakan-kebijakan pendidikan Islam di lingkungan sekolah. Dalam rangka peningkatan kualitas, SDN 013 Palaran menerapkan strategi peningkatan kualitas subjek, kualitas proses, kualitas hasil, dan kualitas dampak.

Peningkatan kualitas subjek dilakukan dengan menyeleksi kemampuan dan kompetensi guru Pendidikan Agama Islam agar sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan di dalam kebijakan, dan juga sesuai dengan kebutuhan sekolah lain. Selain itu, diadakan bimbingan pembelajaran keagamaan, khususnya pembelajaran baca tulis al-Qur'an bagi siswa baru yang tidak memiliki latar belakang pendidikan Islam dan kemampuan yang dimiliki masih belum cukup untuk menerima pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas.

Peningkatan kualitas proses belajar dilakukan dengan mengadakan pelatihan kompetensi bagi guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti setiap bulannya. Pelatihan ini bisa diadakan oleh sekolah dengan persetujuan

dan rekomendasi dari kepala sekolah, bisa juga mengikuti pelatihan yang diadakan oleh penyelenggara dari pihak luar dengan mengirimkan delegasi berdasarkan rekomendasi kepala sekolah.

Peningkatan kualitas hasil pembelajaran dilakukan dengan memaksimalkan kegiatan-kegiatan pendukung kebijakan pendidikan Islam di sekolah bagi siswa-siswi. Kegiatan pendukung yang dimaksud sebagaimana sudah dijelaskan di antaranya Shalat Duha, Hafalan Surah-surah Pendek dan Doa-doa Harian, Pelaksanaan Shalat Zuhur Berjamaah, dan Perayaan Hari Besar Islam.

Peningkatan kualitas dampak dari hasil pembelajaran dilakukan dengan memaksimalkan potensi akademik dan non akademik siswa-siswi terkait kebijakan pendidikan Islam di sekolah lain. Kegiatan ini bisa berupa pendelegasian siswa-siswi dalam kegiatan lomba-lomba terkait pendidikan Islam, seperti tilawah, hafalan, dan sebagainya, yang diselenggarakan di dalam dan di luar lingkungan sekolah.

E. Kesimpulan

Bentuk implementasi kebijakan pendidikan Islam di SDN 013 Palaran di antaranya Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti menyesuaikan kurikulum merdeka serta standar capaian kompetensi dari Kementerian Agama, pelaksanaan program-program di luar kurikulum seperti Shalat Duha, Hafalan Surah-surah Pendek dan Doa-doa Harian, Shalat Zuhur Berjamaah, dan Perayaan Hari Besar Islam. Strategi peningkatan kualitas pendidikan Islam di SDN 013 Palaran melibatkan kepala sekolah, tata usaha, guru, siswa, dan orang tua siswa, dengan strategi utama memaksimalkan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pendidikan Islam di sekolah. Strategi peningkatan kualitas pendidikan Islam yang dilakukan meliputi peningkatan kualitas subjek, peningkatan kualitas proses, peningkatan kualitas hasil, dan peningkatan kualitas dampak.

REFERENSI

- Arwitaningsih, Ria Putranti, Befika Fitriya Dewi, Eggi Mega Rahmawati, dan Khuriyah Khuriyah. "Konsep dan Implementasi Kurikulum Merdeka pada Ranah Rumpun Mata Pelajaran Pendidikan Islam di Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Hadi Mojolaban Sukoharjo." *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI* 10, no. 2 (2023): 450–68.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. "Kualitas." Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Vol. VI Daring. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kualitas>.

- Creswell, John Ward, dan J. David Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Fifth Edition. Los Angeles, United States of America: Sage Publications, 2018.
- Dewanti, Erisa Nada, Farid Setiawan, Majelis Rena Tobasa, dan Pemi Ediansyah. "Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia." *Anwarul: Jurnal Pendidikan dan Dakwah* 2, no. 4 (2022): 316-24. <https://doi.org/10.58578/anwarul.v2i4.494>.
- Ermanovida, Syarifuddin, Aulia Utami Putri, Retna Mahriani, dan Gatot Budiarto. *Strategi Implementasi Kebijakan Kuliah Daring Masa Pandemi Covid-19 dengan Menerapkan Teknologi Digital Dalam Proses Pembelajaran PKN di Universitas Sriwijaya*. Disunting oleh Nur Imanti, Ummi Mardhotillah, Asina Widiawati, dan Sania Patricia. Palembang: Bening Media Publishing, 2021.
- Fauzi, Ahmad. "Analisis Biaya Mutu Dalam Meningkatkan Daya Saing Pendidikan." *Jumpa: Jurnal Manajemen Pendidikan* 1, no. 1 (28 Februari 2020): 51-62.
- Fiantika, Feny Rita, Mohammad Wasil, Sri Jumiyati, Leli Honesti, Sri Wahyuni, Erland Mouw, Jonata, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Giantara, Febri, dan Reni Amiliya. "Urgensi Kebijakan Pendidikan Islam sebagai Bagian dari Kebijakan Publik (Analisis Teoretis)." *Madania: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 11, no. 2 (2021): 86-96.
- Harmita, Dwi, Fina Sofiana, dan Alfauzan Amin. "Inovasi Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam." *JPKD: Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4, no. 5 (2022): 2195-2204.
- Hasanah, Nurhandayani, Muhammad Amin Nur, Siti Alfiyana Rahmatillah, Darwisa, dan Kusfa Hariani Putri. "Analisis Faktor Penghambat dan Upaya untuk Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri." *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 3 (2024): 3162-69. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i3.3769>.
- "Implementation." Dalam *Merriam-Webster Dictionary*. Merriam-Webster.com, 2024. <https://www.merriam-webster.com/dictionary>.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Qur'an Kemenag*. Qur'an Kemenag in Microsoft Word. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2022. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- Madjid, Abd. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Disunting oleh Alviana Cahyanti. Yogyakarta: Samudra Biru, 2018.
- Maghfuri, Amin. "Analisis Politik dan Kebijakan Pendidikan Islam pada Awal Orde Reformasi (1998-2004)." *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2020): 14-26. <https://doi.org/10.30603/tjmpi.v8i1.614>.

- Maulida, Ali, Muhamad Priyatna, dan Unang Wahidin. "Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Perspektif Mastuhu: Studi Analisis Perspektif Pemikiran Tokoh Pendidikan Islam." *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 2 (2019): 453–67.
- Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Second Edition. Thousand Oaks, California: Sage Publications, 1994.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Third Edition. Arizona, United States of America: Sage Publications, 2013.
- Noprika, Mia, Ngadri Yusro, dan Sagiman. "Strategi Kepala Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan." *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam dan Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2020): 224–43. <https://doi.org/10.36671/andragogi.v2i2.99>.
- Presiden Republik Indonesia. Pemerintahan Daerah, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 § (1999).
- — —. Pemerintahan Daerah, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 § (2004).
- — —. Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 § (2007).
- — —. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional." Jakarta, 2003.
- Purnomo, Singgih Aji. "Pengembangan Mutu Manajemen Lembaga Pendidikan dalam Penerapan ISO 9001:2008 pada SMK Swasta Ma'arif NU 1 Ajibarang Provinsi Jawa Tengah." *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam dan Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2020): 124–46. <https://doi.org/10.36671/andragogi.v2i1.78>.
- Rifa'i, Moh. "Kebijakan Pendidikan Islam dalam Era Otonomi Daerah." *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 1 (26 Januari 2017): 99–114.
- Rozi, Anang Fahrur, Rosy Alfiana Dewi, Ikhyaul Khoiri Fatah, Mahmud, dan Madekhan. "Urgensi Pendidikan Islam Non-Dikotomi di Era Society 5.0." *Kuttab: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 6, no. 1 (2022): 92–102. <https://doi.org/10.30736/ktb.v6i1.782>.
- Sidiq, Umar, dan Wiwin Widyawati. *Kebijakan Pemerintah terhadap Pendidikan Islam di Indonesia*. Disunting oleh Ahmad Choirul Rofiq. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019.
- Syafaruddin, Mesiono, dan Aziddin Harahap. "Implementasi Kebijakan Kepala Dinas Pendidikan dalam Peningkatan Pemahaman Terhadap Kitab Suci Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri." *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 11, no. 1 (2022).

<https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ei/article/view/1440>.

Yunitasari, Dukha, Ida Bagus Putu Arnyana, dan Nyoman Dantes. "Implementasi Kebijakan Pendidikan Dasar (Definisi, Aktor Pelaksana, Arena/Konteks, Jenis, dan Langkah Kebijakan Pendidikan Dasar)." *JPPPI: Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia* 9, no. 3 (2023): 1506-15.